

C. **HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkasan mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

Kruskal Wallis H

Uji Kruskal Wallis adalah uji nonparametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik (interval/rasio) dan skala ordinal.

Uji ini identik dengan Uji One Way Anova pada pengujian parametris, sehingga uji ini merupakan alternatif bagi uji One Way Anova apabila tidak memenuhi asumsi misal asumsi normalitas. Kruskal Wallis dapat digunakan pada lebih dari 2 kelompok misal 3, 4 atau lebih.

Rumus Kruskal Wallis

Berikut di bawah ini adalah rumus Kruskal Wallis:

$$K = (N - 1) \frac{\sum_{i=1}^g n_i (\bar{r}_i - \bar{r})^2}{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (r_{ij} - \bar{r})^2}$$

Rumus Kruskal Wallis

Di mana:

n_i : Jumlah pengamatan dalam kelompok.

r_{ij} : Peringkat (diantara semua pengamatan) pengamatan j dari kelompok i .

N : Jumlah pengamatan di semua kelompok.

Sedangkan:

$$\bar{r}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} r_{ij}}{n_i}$$

Rumus Peringkat (diantara semua pengamatan)

Asumsi dalam menggunakan Uji Kruskal-Wallis adalah sebagai berikut:

Peubah dependen harus diukur dalam skala interval, rasio atau ordinal.

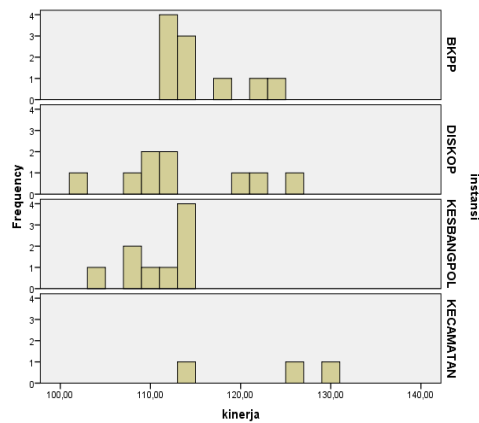
Grup atau sampel yang ingin dibandingkan terdiri dari dua atau lebih yang saling bebas.

Sample harus saling bebas, baik antar grup maupun di dalam grup itu sendiri. Artinya tidak ada observasi atau sampel yang berulang.

Untuk dapat menginterpretasikan dengan benar hasil Kruskal-Wallis maka terlebih dahulu harus dicek apakah data di setiap grup memiliki ragam yang sama atau bentuk sebaran yang sama.

Pengujian dengan menggunakan Analisis Kruskal Walls

Pengujian ragam data di setiap grup yang sama atau bentuk sebaran yang sama.



Graph

Diagram di atas menunjukkan bahwa keempat grup memiliki sebaran yang berbeda, sehingga kita hanya bisa melihat perbedaan rata-rata antar grup saja. Hal ini menjadi penting untuk dicek terlebih dahulu, karena akan mempengaruhi pada kesimpulan akhir.

Pengujian Kruskal-Wallis

H0 : Sistem Informasi Administrasi Presensi tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja BKPP, Diskop, Kesbangpol dan Kecamatan

H1 : Sistem Informasi Administrasi Presensi memberikan pengaruh terhadap kinerja BKPP, Diskop, Kesbangpol dan Kecamatan

Kruskal-Wallis Test

Ranks

	instansi	N	Mean Rank
KinerjaBKPP		10	19,50
	DISKOP	9	13,44
	KESBANGPOL	9	11,33
	KECAMATAN	3	26,00
	Total	31	

Dapat dilihat bahwa rata-rata skala paling tinggi ada pada responden kinerja kecamatan. Secara sekilas terdapat perbedaan rata-rata antara keempat group kelompok responden tersebut, namun perlu dilihat apakah perbedaan ini signifikan atau tidak maka dilihat hasil uji Kruskal Wallis di bawah ini :

Test Statistics^{a,b}

	kinerja
Chi-Square	8,268
Df	3
Asymp. Sig.	,041

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable:
instansi

Nilai P Value ditunjukkan oleh nilai Asymp. Sig. Jika nilai P Value < batas kritis penelitian maka keputusan hipotesis adalah menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

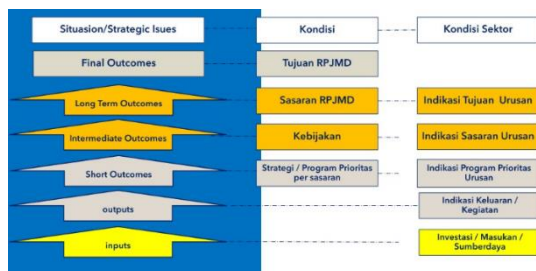
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan software SPSS diatas, terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. 0,041, apabila dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$ maka dapat

disimpulkan bahwa H0 ditolak, artinya bahwa berjalannya sistem informasi administrasi presensi memberikan pengaruh terhadap kinerja BKPP, Diskop, Kesbangpol dan Kecamatan.

Dari hasil analisis data statistik tersebut menunjukkan bahwa Analisis sistem administrasi presensi, analisis sistem informasi administrasi presensi merupakan sistem informasi yang dapat mempengaruhi pegawai dalam menjalankan kewajibannya dalam peningkatan kinerja dan beban kerjanya, dalam masalah ini dari setiap unit analisis telah sesuai dilakukan dan dijalankan terutama masalah kinerjanya, dari hasil analisis statistik dapat dilihat mengenai pengaruh sistem informasi administrasi presensi terhadap perubahan kinerja ASN kota Bandung dalam hal ini yang mewakili kewilayahan kecamatan buah batu, yang mewakili instansi otonom dinas koperasi usaha kecil menengah dan untuk lembaga teknis Kesbang pol dan BKPP, terlihat berpengaruh tetapi hanya sebatas pengaruh dari ASN tanggung jawab terikat takut dipotong tujuannya belum pada perubahan karakter dalam bekerja merupakan suatu keajaiban,

STRUKTUR DAN PADANAN LOGIC MODEL DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA PD

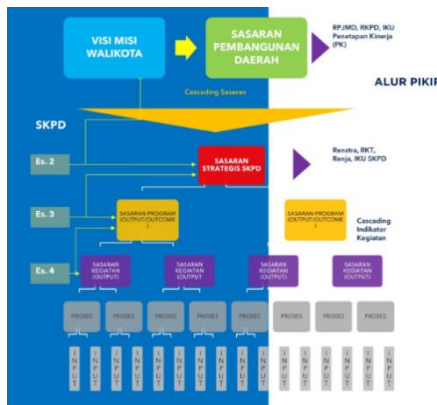
Gambar 4.1



Sumber : Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Kota Bandung

PENGUKURAN KINERJA Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan konsep peningkatan kualitas program dan kegiatan dengan mewajibkan setiap penanggungjawab program / kegiatan melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil (outcome) serta keterpaduan lintas PD dengan mekanisme Pemetaan Kinerja (cascading). Memastikan seluruh sasaran pembangunan daerah dan indikator-indikatornya berorientasi pada hasil (outcome) dan langsung dirasakan oleh masyarakat

ALUR PIKIR AKUNTABILITAS KINERJA



Gambar 4.3

Sumber : Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Kota Bandung

Evaluasi kinerja merupakan pelaksanaan dalam optimalisasi manajemen kinerja dan perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bandung. Dalam hal ini inspektorat Kota Bandung telah melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) secara berkala dan secara khusus pada setiap akan dilaksanakan evaluasi AKIP dan terdapat petunjuk pelaksanaan evaluasi AKIP yang sangat rinci dan jelas untuk menghindari perbedaan persepsi dan dituangkan dalam bentuk peraturan Wali Kota Bandung Nomor 526 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

IMPLEMENTASI RPJMD KOTA BANDUNG



Gambar 4.4

Sumber : Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Kota Bandung

Program kerja daerah diimplementasikan dalam rencana kerja RPJMD dalam pelaksanaannya dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah lain atau dengan stakeholder atau juga dengan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan rencana kerja.

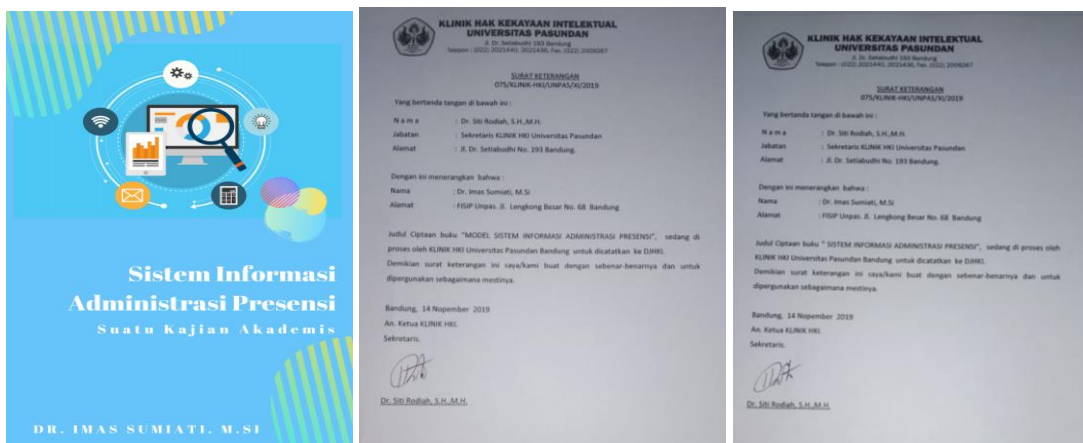
Proses perencanaan dibangun dengan mengedepankan kepentingan dan pelayanan public yang tentunya berbasis pada teknologi informasi dan sesuai tugas fungsi dari para ASN yang kedepannya muatannya sesuai tujuan kerja nya dan dapat memelaksanakan kerja dengan

kegiatan sesuai rencana kerja yang tertuang dalam RPJMD yang akhirnya para ASN memiliki beban kerja dan penilaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan terimplentasikan memberikan layanan pada public sesuai kepentingannya yang arahnya per tahun berjalan dalam program.

Rencana kerja yang terjemahan dari program itu harus disesuaikan dengan visi misi kota Bandung tentunya teraplikasikan dalam setiap pekerjaan di tahun 2019 dan 2020 yang akan menjadikan program kerja dari prioritas sehingga pelayanan public yang kaitannya sesuai tugas pokok fungsi dari skpd yang jadi bahan telaahan kita seperti Kecamatan Buah Batu yang merupakan repercentatif kewilayahan Dinas Kopersi yang merupakan repercentatif dari intasi otonom dan badan kesatuan bangsa serta BKPP repertsetatif dari lembaga teknis terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dalam sistem informasi administrasi presensi yang artinya dengan pengetahuan pekerjaan, kualitas dan kuantitas kerja,tanggungjawab, personal qualities memberikan kontribusi pada pemerintah kota Bandung yang dapat memberikan pelayanan public yang optimal.

D. **STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Luaran penelitian berbentuk buku yang sedang dalam proses dan model juga dalam proses hak cipta.



E. **PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

Mitra bekerjasama melalui FGD dan pengumpulan data lainnya dan analisis hasil.



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
JALAN WASTUKENCANA NO. 2 TELP (022)2426190 Bandung

BIODATA

Nama	RAHADYAN, SE
NIP	19730327 199803 1 003
Tempat/Tanggal Lahir	Bandung, 27-03-1973
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Status Perkawinan	Kawin
Agama	Islam
Pendidikan Terakhir	Sarjana
Pangkat/Golongan	Pemata Muda T.L. IIIA
Jabatan/Unit Kerja	Kepala Sub. Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan PAD Setda Kota Bandung
Alamat Kantor	Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Tlp.Kantor : (022)4246393
Alamat Rumah	Perum Cluster Bati II A-59 Rt. 006/013 Kel.Sukapura Kec.Karascondong

Bandung, 23 Juli 2019
Yang bersangkutan,

Rahadyan, SE
NIP. 19730327 199803 1 003

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	: Amos Pahala SE
Tempat, Tanggal Lahir	: Bandung, 8 Maret 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Status Kepegawaian	: PNS
Kedudukan Kepegawaian	: FKG Punctat Bandung
Pendidikan Akhir	: S1 Ekonomi Manajemen Tahun Pendidikan Akhir : 2010
Jenis Jabatan	: Struktural
Eselon	: Ma
Nama Jabatan	: Kepala Sub Bidang Kinerja
SOPD	: Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Golongan Akhir	: IIIc, Pemata

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Wasitukencana No.2 Telp. 022-4230097 Bandung

REKOMENDASI PENELITIAN
 NOMOR 070/780/Datesebtagipol

Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Menimbang : Surat dari Universitas Pasundan Nomor : 054/Upas-PSUP /DI/Q/IV/2019 Tanggal 08 April 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAWHA :

a. Nama : **DR. IMAS SUMIATI**
 b. Alamat Lengkap : Jl. Margasari III No. 5 Kel. Cijavura Kec. Buah Batu
 No. Identitas, Hp : NIK. 3273226412690001, No. 081222810207
 c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian Dengan Judul "Analisis Sistem Informasi Administrasi Presensi di Kota Bandung"
 2) Lokasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Kecamatan Buah Batu Kota Bandung
 3) Anggota Tim : Dr. Iain Sodikin, Hj. Yayan Mulyana dan Tine Ratna P
 4) Bidang Penelitian : -
 5) Status Penelitian : Baru
 6) Waktu Pelaksanaan : 12 April 2019 s.d 12 Oktober 2019

d. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Bandung c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, paling lambat 1 minggu setelah selesai.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sepenuhnya.

Bandung, 12 April 2019
 a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 DR. IAIN SODIKIN, M.Si
 NIP. 19641210 198503 2 009



F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Pada dasarnya dalam penelitian ini tidak ada kendala yang berarti tetapi hambatan itu ada terutama sistem yang sudah memiliki platform sehingga peneliti sulit untuk mengintervensi terhadap sistem yang sudah ada. Sistem ini baru mengcover bagaimana para ASN melaksanakan kewajibannya sesuai TUPOKSI, belum pada perubahan pada karakter.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Rencana tindak lanjut penelitian adalah pengembangan terhadap model sistem informasi administrasi presensi jika memungkinkan memberikan intervensi terhadap sistem yang sudah ada melalui perubahan karakter ASN dalam pekerjaannya melalui nilai-nilai religius yang menekankan pada bekerja adalah nilai ibadah sehingga model pengembangan SIAP dapat merubah karakter ASN menjadi sosok ASN yang bekerja merupakan ibadah yang tidak ada nilai lain selain tanggung jawab pada yang sifatnya pengembangan diri juga yang paling utama sifat dari nilai religius.

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Buku

1. A.A.Anwar Prabu Mangkunegara. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. PT.Remaja Rosda Karya, Bandung.
2. Yakub. 2012. Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Turban, E. dan L. Volonino. (2012). Information Technology for Management. 8th ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
3. Anggara, Sahya, 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.
4. Adinoto, Trio Suryaning. (2013). "Perancangan Absensi Karyawan Smp Negeri 1 Kramat Tegal". Jurnal Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
5. Agus, Dharma. (2005). Manajemen Supervisi. Jakarta.: Raja Grafindo Persada
6. Alter, Steven. 1992. Information Systems: A Management Perspective, Addison-Wesley Publishing Co. Inc.
7. Alex S. Nitisemito, 1982, Manajemen Personalia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
8. Azwar A. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi 3. Jakarta: Binarupa Aksara
9. Budioro, B. 2002 Pengantar Administrasi Kesehatan Masyarakat. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
10. Bodnar, George H. and William S. Hopwood. 1998. Accounting Information System. 6th Ed. New Jersey : Prentice-Hall International, Inc.
11. B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2003, Manajemen Tenaga kerja Indonesia, Edisi dua. Jakarta : PT. Bumi Aksara
12. Chandler, Ralph C. dan Plano. Jack C. (1988). The Public Administration Dictionary. John Wiley & Sons,
13. Handayani Ratih. 1985 . Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : NV.Sapdodadi

14. Hasibuan, Malayu S.P, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta : PT. Bumi aksara
15. Indrajit. 2001. Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object. Bandung: Informatika.
16. Soeherman, Bonnie dan Marion Pinontoan. 2008. Designning Information System Concepts dan Cases With Visio. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
17. Sondang P, Siagian. 1996, Manajemen Sumber Daya Manusia.
Jakarta : Bumi Aksara
18. Veithzal Rivai. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : PT. RAJAGRAFINDO PERSADA,
19. Wasono, Ig. 1997. Etika, Komunikasi Kantor. Yogyakarta : Kanisius
20. li, B. A. B., & Pustaka, T. (n.d.). Oxford advance learner's dictionary of current english.
Kebijakan, P. D. A. N. (n.d.). Pedoman dan kebijakan remunerasi.
21. Ladjamudin, al-bahra bin. (2013). ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI (pertama). Yogyakarta: GRAHA ILMU.
22. Prof. Dr. Azhar Susanto, MBus, A. (2013). Sistem Informasi Manajemen.
23. Sutabri, T. (2012). Analisis Sistem Informasi (K. Putri, ed.). Yogyakarta: Cv Andi Off

Dokumen

1. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

. Peraturan Daerah Kota Bandung No 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandung No 1394 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

C. Jurnal

1. Wildan Lutfi A, Mayahayati K, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Jam Kerja Di Kabupaten Kutai Kartanegara, <https://doi.org/10.24258/jba.v11i3.206>
2. Vicky Lawere, Sofia Pangemanan, Josef Kairupan, Evaluasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Presensi Sistem Sidik Jari
3. Agustina Widia, Endang Rusdianti, Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Tambahan Penghasilan Pegawai Sebagai Variabel Moderating <https://doaj.org/article/443d73e7b8cf4986959a08b4b0d67477>

Patra Dohlia, Syamsurizaldi, Novera Wandra. Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja PNS 4. pada Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan.

5. A. A. I. Alit Pramawat, Ida Ayu Putu Sri Widnyani. Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepagwaian Dearah Kabupaten Klungkung.

6. Daulay, Ikhwan Hidayat. Pengaruh Komitmen Pada Tugas Dan Pemberian Imbalan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selat

